

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA



Ketua : Letjen TNI (Purn) DR H.C. H. Sutowo, SH
Sekjen : Letjen TNI (Purn) Yusuf Kartanegara
Bendahara : Ie Kiang Ging (Cing-Cing)
Alamat DPP : Jl. Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : 021-31922733
Fax : 021-31922822
Email : jkarta2002@yahoo.com
Website : www.pkpindonesia.or.id



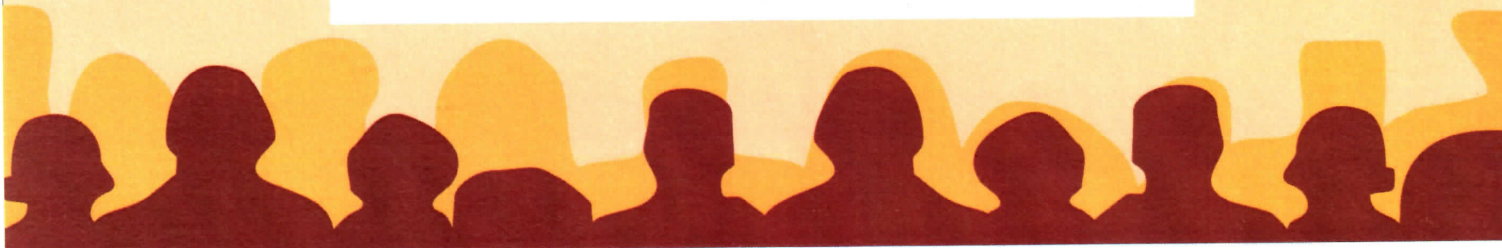
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta
Telp : (021) 31937223, Fax : (021) 3157759
website : www.kpu.go.id



PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

15





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
MASA BAKTI 2010-2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 51/DPN PKP IND/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP Indonesia Masa Bakti 2010-2015 Hasil Pergantian Antar Waktu
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA MASA BAKTI 2010-2015
- PERTAMA : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan kedudukan kantor tetap di JL. Diponegoro No 63, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Phone (021) 319 22 733, Fax (021) 319 22 822, E-mail: jkarta2002@yahoo.com, website: www.pkpindonesia.or.id yang dinyatakan dengan Akta Nomor 06 tanggal 08 Maret 2013 tentang Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, S.H.,M.Hum berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Susunan Kepengurusan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa bakti 2010-2015 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Nomor : M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2013

Tanggal : 17 April 2013

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan
INDONESIA

PERIODE 2010 - 2015

Dewan Penasehat

Ketua	: Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno
Anggota	: Mayjen TNI (Purn) Syaiful Sulun
Anggota	: Tatto S. Pradjamanggala, SH
Anggota	: Lulu Lugiyati Edi Sudradjat
Anggota	: Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo
Anggota	: Enny Achyani Busiri
Anggota	: Mayjen TNI (Purn) Haris Sudarno
Anggota	: Hj. BRAY Moeryati Soedibyo
Anggota	: Tjetje Hidayat Padmadinata
Anggota	: Drs. H. Haidar RS
Anggota	: Marsma TNI (Purn) H. Sri Hardjo, SE
Anggota	: Ir. Teuku Muda Yusuf, MM

Dewan Pakar

Ketua	: Prof. DR. Sri Edi Swasono
Anggota	: Prof. DR. Haryono Soeyono
Anggota	: Prof. Sodik
Anggota	: Mayjen TNI (Purn) Monang Siburian, MM
Anggota	: DR. Ir. Djiteng Roedjito
Anggota	: DR. Pandji Hadinoto

Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional

Ketua Umum	: Letjen TNI (Purn) DR H.C. H. Sutowo, SH
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	: Nehemia Lawalata, SE
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	: Mayjen TNI (Purn) Mashudi Darto
Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi	: Dra. Muthiah Alhasany
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	: Bruno Kaka Wawo
Ketua Bidang Legislator	: Ashary Ali Agus, SE. MM
Ketua Bidang Ekonomi	: Jimmy E. Jambak, SE
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Bea Larasati Iskandar
Ketua Bidang Politik, dan Keamanan	: Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso
Sekretaris Jenderal	: Letjen TNI (Purn) Yusuf Kartanegara
Wakil Sekretaris Jenderal	: Rully Soekarta
Wakil Sekretaris Jenderal	: Jeffry Palijama, SH
Wakil Sekretaris Jenderal	: Juanita L. Suling
Wakil Sekretaris Jenderal	: Romulus Sihombing, SH.
Bendahara umum	: Ie Kiang Ging (Cing-Cing)
Wakil Bendahara Umum	: Janti Husodo
Wakil Bendahara Umum	: Idda Judiciana, SE
Wakil Bendahara Umum	: Linda Setialoati
Departemen Koperasi	: Sri Romadona
Departemen Usaha Kecil dan Menengah	: Diah Puspitasari
Departemen Perdagangan	: RA Ayu Suzane
Departemen Pertanian	: Astried C. Bisara

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

